

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)

Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru

Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril

Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan *Gemeente* Mojokerto Tahun 1918-1942

Firmanda Dwi Septiawan

Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir

Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati

Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia

Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti

Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional

Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri

Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV

Siti Khusnul Khotimah, Yuliati

Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia

Privera Ajeng Ersanda

Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Ira Sugiarnik

Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX

Yohanes Purwanto



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru <i>Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril</i>	79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan <i>Gemeente</i> Mojokerto Tahun 1918-1942 <i>Firmanda Dwi Septiawan</i>	88
3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir <i>Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati</i>	98
4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia <i>Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti</i>	106
5. Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional <i>Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri</i>	114
6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV <i>Siti Khusnul Khotimah, Yuliati</i>	128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia <i>Privera Ajeng Ersanda</i>	134
8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir <i>Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril</i>	141
9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi <i>Ira Sugiarnik</i>	150
10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX <i>Yohanes Purwanto</i>	164

POLA INSURJENSI ANDI AZIS SEBAGAI PEMBERONTAKAN MILITER DALAM PENDEKATAN MODEL KEAMANAN NASIONAL

Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri
Universitas Pertahanan RI

Alamat korespondensi: novky.asmoro@idu.ac.id

Diterima: 30 April 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

Abstract

The Andi Azis incident gave an important meaning to the historical traces of the Indonesian military's struggle in eradicating the rebellion which was actually driven by its officers at that time. The incident that occurred in early April 1950 in Makassar, South Sulawesi was not only interpreted as a form of rebellion due to dissatisfaction with Jakarta's political policies in managing the formation of the state which at that time was still unstable but also as a social resistance of the regional army as the most effective representation of people's power in its time. Historical Research analysis which refers to the historical research methodology process in the form of Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography in this article will try to juxtapose the theories of Insurgency and National Security so that the interesting dimensions of the Andi Azis incident bring new perspectives in the development of defense strategy studies and military philosophy. Andi Azis' rebellion movement can be a separate experience and lesson, especially for the Indonesian Armed Forces (Tni) in promoting a social approach and oneness with the community in addition to repressive measures in tackling similar movements, which are actually still happening in several regions in the archipelago.

Keywords: Andi Azis incident, insurgency, national security, Indonesia Armed Force, Unity.

Abstrak

Peristiwa Andi Azis memberi arti penting pada jejak sejarah perjuangan militer Indonesia dalam memberantas pemberontakan yang justru digerakkan para perwiranya saat itu. Peristiwa yang terjadi di awal April 1950 di Makassar Sulawesi Selatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Jakarta dalam mengelola pembentukan negara yang saat itu memang masih belum stabil namun juga sebagai perlawanan sosial tentara daerah sebagai representasi kekuatan rakyat paling efektif di masanya. Analisis Historical Research yang mengacu pada proses metodologi penelitian sejarah berupa Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi pada artikel ini akan mencoba menyandingkan teori-teori Insurgensi dan Keamanan Nasional sehingga dimensi menarik pada peristiwa Andi Azis tersebut membawa perspektif baru dalam pengembangan studi strategi pertahanan dan ilmu filsafat militer. Gerakan pemberontakan Andi Azis dapat menjadi pengalaman dan pelajaran tersendiri terutama bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengedepankan pendekatan sosial serta kemanunggalan bersama masyarakat disamping langkah-langkah represif dalam menanggulangi gerakan serupa yang sesungguhnya hingga saat ini pun masih terjadi di beberapa daerah di nusantara.

Kata Kunci: Peristiwa Andi Azis, insurgensi, keamanan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemanunggalan.

A. Pendahuluan

Pada awal April 1950, dimana usia kemerdekaan masih sangat muda, muncul pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan berupa gerakan insurgensi militer ini dikomandoi oleh seorang mantan perwira KNIL berpangkat Kapten yakni Andi Azis.

Sebenarnya Kapten Andi Azis ini baru diterima masuk kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Andi Azis yang memiliki pengaruh kuat sehingga memiliki banyak pasukan ingin mempertahankan eksistensi Negara Indonesia Timur (NIT). Selain itu, motif lainnya yakni dilatarbelakangi oleh penolakan

terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Tepatnya pada 5 April 1950, pasukan pimpinan Andi Azis mulai melancarkan beberapa serangan dan menduduki tempat-tempat penting, bahkan menawan atasannya sendiri yakni Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Gerakan tersebut diawali dengan maraknya kegiatan pasukan APRIS (ABRI) yang diganggu oleh KL/KNIL. Provokasi juga kerap dilancarkan pasukan KNIL sehingga menyulut beberapa konflik dengan pasukan APRIS. Pertempuran keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus 1950.

Kemelut di Makassar tersebut membuat Jakarta mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk respon semakin meluas dan masifnya gerakan militer Andi Azis terutama puncaknya pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang secara umum berisi perintah kepada Andi Azis untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke APRIS di pusat. Tenggat waktu yang diberikan kepada Kapten Andi Azis yakni 4 x 24 jam untuk segera menyerahkan senjata beserta, menarik pasukannya dan membebaskan seluruh sandera yang ditahannya.

B. Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi terkait analisis tentang pola insurjensi Andi Azis sebagai pemberontakan militer dalam pendekatan model keamanan nasional maka ditetapkan bentuk metodologi penelitian kualitatif. Hal ini terkait bahwasannya tindakan insurjensi secara *time lines* telah berlangsung dalam periode transisi sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

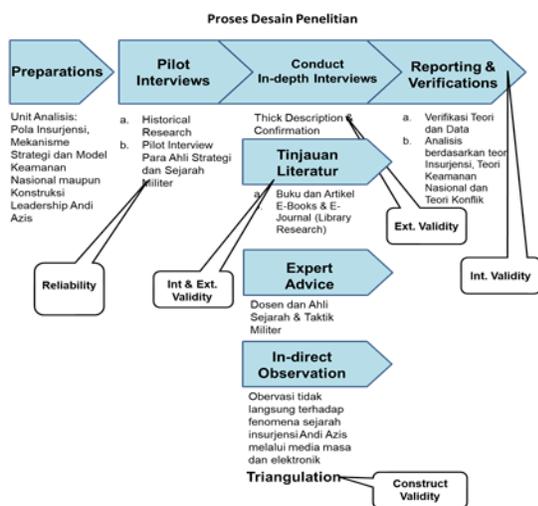
(NKRI). Oleh karena itu perlu adanya upaya analisis yang berangkat dari awal timbulnya pemberontakan militer ini hingga untuk meng-*capture* seoptimal mungkin data serta kronologis peristiwa yang ada sehingga perlu pendekatan *Historical Research*. Melalui pendekatan ini diharapkan akan terkumpul data secara sistematis dan relevan dengan obyek penelitian sehingga mampu menganalisis beberapa dampak dan tren yang akan berkembang dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini sebagai upaya antisipatif di masa mendatang (Gay, 1996). Disamping itu, analisis juga akan mengkaitkan beberapa fenomena menarik yang terjadi bagaimana Andi Azis menyusun kekuatan, mengorganisir pasukan dan pola-pola insurjensinya hingga memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan akhirnya mampu ditumpas oleh pasukan APRIS/TNI.

Penetapan pendekatan *Historical Research* dalam penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali sebanyak mungkin data dan informasi yang ada. Dengan bentuk beberapa landasan teori, definisi serta variabel maka analisis akan lebih banyak mengeksplorasi hubungan antarvariabel sehingga kombinasi pendekatan tersebut akan memperdalam pemahaman “mengapa” dan “bagaimana” sebuah imperium terluas dalam sejarah dunia itu mampu tumbuh cepat dalam segala keterbatasannya. Untuk membangun pemahaman yang komprehensif selain dikonstruksikannya penelitian dengan pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian sejarah, maka diperlukan survei-survei lanjutan yang berguna dalam membentuk desain penelitian agar lebih detail, analitis dan relevan

dengan perspektif strategi perang moderen.

Guna mendapatkan penelitian kualitatif yang sistematis maka penelitian akan didesain berdasarkan kombinasi antara pendekatan penelitian dengan survei-survei berdasarkan pengembangan subjek dan objek penelitian. Seperti pada penelitian sejarah lainnya, adanya pendekatan beberapa strategi pertahanan *counter insurgency*, konsep intelijen modern dan metode perang modern, maka fokus historical research akan menjawab bagaimana gerakan Andi Azis mampu bertahan terutama di daerah Sulawesi Selatan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat sesuai proses dari desain penelitian termasuk atribusi dari pendekatan yang digunakan maka akan ditampilkan dalam diagram pada Gambar 3 berikut ini :



Gambar 2. Diagram Proses Desain Penelitian
 Sumber: Wahyuni (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*,

Sesuai diagram di atas, desain dari proses penelitian diawali dengan tahap persiapan. Identifikasi dari unit analisis memerlukan kecermatan karena sebagai landasan dalam menentukan berbagai pertanyaan terkait penelitian ini. Pada penelitian kali ini yang menjadi unit analisisnya antara lain sistematika organisasi, mekanisme taktik dan

strategi gerkan Andi Azis maupun konstruksi *leadership*-nya dalam memimpin pasukannya.

Untuk mendapatkan reliabilitas dan *content validity* yang akurat terhadap hasil penelitian ini, disusun beberapa pertanyaan utama di dalam *guide line* pertanyaan utama. Dengan tersusunnya panduan pertanyaan tersebut diharapkan proses penggalian informasi dengan pendekatan *hystotical research* dapat terancang secara sistematis dan fokus pada target-target objek penelitian. Melalui hal tersebut diharapkan pertanyaan-pertanyaan terkait historical *research*-pun dapat *re-cover* karena pada prinsipnya panduan pertanyaan merupakan daftar pertanyaan sebagai panduan untuk membuat sebuah laporan penelitian (Yin, 2003).

Untuk mempersiapkan penelitian yang kaya akan informasi-informasi akurat, diperlukan sebuah *pilot study* sebagai awal dari penelitian terkait pihak-pihak yang dipilih sebagai informan. Terkait sejarah perkembangan pasukan Mongol, maka pihak yang dapat dijadikan narasumber antara lain dosen sejarah perang, dosen strategi pertahanan militer dan pengamat sejarah dunia. *Pilot interview* dapat dilaksanakan dengan menentukan beberapa orang yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menghubungkannya ke para narasumber terpilih sesuai kriteria di topik penelitian sehingga mampu memberikan informasi-informasi yang akurat selama berlangsungnya penelitian.

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan berdasarkan proses triangulasi guna mencapai hasil penelitian kualitatif yang komprehensif. Empat metode pengumpulan data akan digunakan pada penelitian ini

diantaranya in-depth interviews, studi literatur, *expert advice* dan *in-direct observation*. Untuk melaksanakan *in-depth interview* maka formatnya akan ditetapkan dalam bentuk *semi-structured* yang berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun lewat panduan wawancara. Agar hasil penelitian sesuai kaidah *construct validity* maka diperlukan sebuah studi literatur. Pada studi ini, peneliti akan mengkonfirmasi hasil *interview* responden dengan beberapa data sekunder dan data statistik yang bersumber dari institusi yang legitimate serta dipublikasikan lewat beberapa sumber media.

Guna mendapatkan *theoretical sense* yang lebih tepat maka pengumpulan data dari berbagai responden juga harus dikonfirmasi dengan beberapa teori atau definisi yang telah disimpulkan sebelumnya dengan cara *expert advice*. Jika langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan maka pengambilan sample terhadap unit analisis akan tepat dalam merepresentasikan efektifitas pasukan Mongol dalam menaklukkan bangsa-bangsa koloninya.

Pada tahap penyusunan laporan dan verifikasi, maka beberapa hal penting yang telah dikembangkan berdasarkan *case study protocol* dapat dijadikan rujukan awal. Dengan selalu menjaga konsistensi dan fokus pada outline pertanyaan maka laporan dan verifikasi akan mengikuti hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Melalui kesimpulan awal tersebut paling tidak telah memberikan gambaran awal terhadap fenomena yang berhasil diamati oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang strategi militer yang dijadikan acuan, maka secara garis besar telah tersaji penjelasan yang relevan terkait kejeniusan para panglima Mongol dalam menerapkan konsep intelijen dan perang psikologi guna membumi

hanguskan negara-negara yang ditundukannya.

Penyusunan rencana penelitian harus dilaksanakan dengan tahapan yang cermat terutama untuk memenuhi empat kriteria dalam *The Four Design Tests* (Yin, 2003) yakni *Construct Validity*, *Internal Validity*, *External Validity* dan *Reliability*. Pada *construct validity*, akan membuktikan bahwa sebuah penelitian kualitatif bukanlah penelitian yang subjektif. Penelitian kualitatif harus memiliki derajat kesesuaian dengan teori atau definisi yang ada selayaknya sebuah penelitian ilmiah. Hal ini akan menjadikan sebuah penelitian kualitatif memiliki obyektifitas yang kuat berdasarkan teori yang ada (*theoretical sense*). Pada *interval validity*, proses triangulasi adalah faktor yang terpenting baik yang berdasarkan keragaman sumber data, investigator, lokasi dan sebagainya (Denzin dan Lincoln, 1994).

Internal validity akan menjamin bahwa data yang terkumpul berasal dari beberapa sumber dan diolah dengan bermacam metode serta responden terjamin pula sebagai orang yang layak dipertanggungjawabkan pendapatnya atas dasar legitimasi yang dimiliki. Sedangkan *external validity* akan membuat hasil penelitian yang mampu digeneralisir sebagai perspektif umum dari objek penelitian bahkan mampu diatribusi pada institusi atau organisasi yang lain. Dengan reliabilitas yang tinggi, penelitian kualitatif diharapkan mampu diadopsi cara-cara pengolahan datanya untuk waktu serta objek yang berbeda namun dapat dipertanggungjawabkan memiliki hasil yang sama

C. Pembahasan

Data dan fakta yang dianalisis serta dielaborasi secara spesifik diharapkan

akan menghasilkan *lesson learned* yang dapat diambil manfaatnya guna pengembangan kajian strategi kampanye militer kontemporer. Menjadi tantangan tersendiri ketika *Historical Research* berdasarkan fenomena sejarah masa lalu harus dapat dianalisis secara akurat guna proyeksi masa depan (Gay, 1996)

Faktor yang Memicu Niat Insurgensi Andi Azis

Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih berbentuk negara bagian atau federasi. Salah satunya ada NIT yang sudah terbentuk pada Desember 1946. Wilayahnya terdiri dari kepulauan Sunda Kecil (sekarang Bali dan sekitarnya), Maluku, dan Sulawesi. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (23 Agustus-2 November 1949) di Den Haag, Indonesia mengumumkan bentuk Negara RIS dengan dibagi menjadi 16 federasi agar diakui kedaulatannya oleh pihak Belanda.

Menurut Laessach M Pakatuwo dan dkk (2018) dalam artikel Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945-1950 yang termuat di jurnal *Pattingalloang* menyatakan bahwa perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) ini hanya akal-akalan Belanda yang berusaha memecah belah Indonesia dan mempertahankan tanah jajahannya ketika itu. Akhirnya, keputusan KMB tidak bertahan lama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diajukan oleh beberapa kalangan pro persatuan sebagai satu-satunya pemerintahan, sedangkan wilayah lain harus dileburkan di dalamnya, termasuk NIT.

Pemberontakan yang dipimpin Andi Azis, mantan perwira Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), berlangsung mulai 5 sampai 15 April 1950 yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan yang di latarbelakangi oleh tidak

setujunya Andi Azis terhadap rencana penyatuan Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Bachtiar dan dkk, (2019), dalam artikel *Peristiwa Andi Azis di Sulawesi Selatan 5 April 1950 yang termuat di Seminar Series in Humanities and Social Science No.1 (2019)*, akhir Maret 1950, RIS meresmikan Negara Bagian Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur termasuk bagian NKRI. Sedangkan, NIT baru mendapatkan kabar penyatuannya pada 4 April 1950.

Andi Azis dan para mantan anggota KNIL ketika itu tidak menyetujui hal tersebut, terlebih lagi terhadap rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Disana, akhirnya terdapat dua kubu yang saling bersinggungan satu sama lain, yakni Andi Azis dengan pihak yang menginginkan persatuan. Terdapat tujuan yang membawa Andi Azis hingga berani menentang kebijakan pemerintah pusat. Ia ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya, (Yuda Prinada, 2021).

Kondisi Politik dan Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan di Awal Kemerdekaan RI

Pada bulan Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Pada saat itu perang pasifik memasuki fase terakhir, seiring dengan kemenangan kekuatan sekutu disatu pihak dan kekalahan Jepang di pihak yang lain. Ditengah kondisi ketidakpastian dan kekosongan kekuasaan dalam masa transisi kekuasaan dari pihak yang kalah (Jepang) kepada pemenang sekutu, para pemimpin bangsa Indonesia beserta

para pemuda dengan sigap mengisi saat yang genting itu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsanya. Namun berita proklamasi kemerdekaan tidak diterima langsung dengan jelas di Sulawesi Selatan, disebabkan karena ada usaha Jepang untuk menutup-nutupi tentang proklamasi kemerdekaan. Akibatnya sangat sulit di dapatkan informasi tentang kemerdekaan. Penandatanganan piagam penyerahan Jepang pada sekutu dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang dan pernyataan penyerahan kekuasaan kepada sekutu membangkitkan semangat yang meluap-luap dari pemuda-pemuda Indonesia yang selama ini bergiat-bergiat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia agar mengumumkan kemerdekaan Indonesia (Harun, 1984).

Suasana di Sulawesi selatan, terutama di Kota Makassar setelah penduduknya secara resmi mendengar berita Proklamasi kemerdekaan, memperlihatkan yang lain dari biasanya. Jika menjelang Proklamasi kemerdekaan terutama saat-saat terakhir masa pendudukan militer Jepang hampir semuanya diliputi oleh suasana ketakutan dan perasaan tertekan. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan suasana itu berubah menjadi yang diliputi kegembiraan. Semua lapisan sosial di masyarakat dari semua tingkatan umur dan kelompok etnik penduduk kota Makassar menyambut berita proklamasi dengan rasa syukur.

Sejak diketahui bahwa diantara pasukan sekutu yang datang ke Makassar terdapat anggota NICA (Netherlands Indies Civil Administration), rakyat yang berada di Kota Makassar melakukan protes dengan melakukan demonstrasi

mengibarkan bendera Merah Putih tanggal 27 September 1945.

Pemerintah NICA dengan keinginannya membentuk negara bagian (federasi) seperti wilayah timur besar mendirikan NIT (Negara Indonesia Timur) hal ini tentunya bersebrangan dengan pandangan pejuang-pejuang muda Sulawesi Selatan yang siap untuk mati. Pemuda-pemuda Sulawesi Selatan berangkat ke Jawa untuk mencari bantuan dari MBT (Markas Besar Tentara) guna melakukan perjuangan di Sulawesi selatan. Akhir desember 1945 delegasi pemuda Sulawesi tiba di Jawa yaitu Manai Sopian, kemudian Saleh Lahade dan Andi Matalatta. Mereka kemudian mencari rekan-rekan guna membantu perjuangan di Sulawesi Selatan, satu-satunya kesatuan bersenjata yang dapat di ajak bekerjasama adalah Kahar Muzakkar dengan BKI (Barisan Kemajuan Indonesia) (Laessach M Pakatuwo dan dkk, 2019).

Makassar pada masa pemerintah Indonesia Timur tetap menjadi pusat perekonomian untuk daerah Sulawesi selatan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan perekonomian yang ada di Makassar ketika itu dapat dilihat pada pekerjaan Grosir yang merupakan kerjasama antara pihak asing dan jawatan-jawatan perokonomian serta dewan ekonomi Indonesia yang ada di Makassar, contohnya pengusaha-pengusaha indonesia telah dipercaya untuk menjadi pengusaha grosir dari pabrik-pabrik kenamaan milik bangsa asing. Seperti N.V. pusat penjual gula Indonesia di Makassar untuk gula pasir dan N.V Serdid di Makassar untuk hasil-hasil Produksi dari Unilever. Selain dalam bidang grosir kegiatan perekonomian juga dapat dilihat dengan adanya empat dealer mobil di Makassar. Jumlah ini merupakan yang terbanyak

untuk pulau Sulawesi di susul dengan Manado dengan satu dealer. Selain itu juga ada usaha penggilingan padi yang bertambah jumlahnya di bandingkan sebelum terjadinya perang dunia II. Usaha semacam ini khusus di Kota Makassar terdapat dalapan pabrik, (Laessach M Pakatuwo, dkk, 2019).

Selain dari kondisi alam, kondisi lahan juga berpengaruh dalam pengembangan produktifitas beras, lahan Sulawesi Selatan di kenal sebagai lahan yang sangat subur untuk tanaman padi dan amat baik untuk semua jenis persawahan, baik persawahan basah (irigasi) di tanah datar maupun persawahan kering (tenda hujan) di dataran tinggi (Muhlis, 2013). Namun patut diuraikan bahwa walaupun daerah Sulawesi Selatan secara umum dan Makassar secara khusus telah berada dalam kuasa Belanda dengan bentuk NIT, namun sistem kepemilikan tanah atau lahan persawahan masih mengadopsi gaya feodalisme, yakni kepemilikan tanah dikuasai oleh tuan tanah bangsawan dan regent atau kepala daerah (Muhlis, 2013).

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa beras dipandang sebagai komoditi penting di Sulawesi Selatan dan Makassar secara khusus pada masa Negara Indonesia Timur: pertama, beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat Sulawesi Selatan. Kedua, beras sebagai salah satu komoditi ekspor andalan Sulawesi Selatan yang diekspor ke berbagai daerah minus beras seperti Maluku. Ketiga, beras dapat ditukar dengan kopra seperti beberapa kasus yang terjadi di Maluku, dimana daerah Maluku adalah daerah penghasil kopra berkualitas baik yang sangat di inginkan pasaran Amerika dan Eropa.

Di bidang militer banyak usaha untuk memperlemahkan proklamasi yang

telah diraih, misalnya dengan mengadakan siasat berunding sehingga menghasilkan situasi terjepit bagi TNI. Seperti dengan adanya perjanjian Linggar Jati dan Renville, dipandang dari sudut militer perundingan-perundingan tersebut berarti memberikan kesempatan konsolidasi kepada Belanda. Dan menetralsir kedudukan TNI yang telah dapat menduduki posisi-posisi yang sangat menyulitkan Belanda. Van Mook sebagai pimpinan Belanda semasa sebelum pengakuan kedaulatan berusaha menghimpun unsur-unsur yang masih dapat dirangkulnya, untuk memecah belah Indonesia dengan idenya membentuk negaranegara bagian federasi. Tentang pembentukan negara federal mulai dirintisnya pada Konferensi Malino, tanggal 15-25 Juli 1946 dengan dihadiri oleh oknum-oknum daerah yang berhasil dipengaruhi kembali terutama Indonesia Timur (Bachtiar, 2019).

Dari konferensi-konferensi ini lahir pertama kali NIT pada bulan Desember 1946 meliputi pulau-pulau Sunda kecil, Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya berturut-turut dengan pembentukan negara Sumatera Timur (1947) Madura (1948), Pasundan (1948), Sumatera Selatan (1948) dan Jawa Timur (1948). Dalam kondisi yang terjepit negara kesatuan masih dapat memperjuangkan diadakannya KMB, antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Wakil-wakil negara federal yang telah berhasil dibentuk Van Mook pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 di Den Haag yang melahirkan pengakuan kedaulatan. Meskipun pada dasarnya masih kurang, yaitu dengan adanya bentukan RIS dan pengaruh ke cita-cita Uni Indonesia Belanda (Agung, 1985: 614).

Dengan resminya terbentuk RIS, maka seluruh Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Negara-negara tersebut yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Kenegaraan Dayak Besar, Kesatuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, Satuan Kenegaraan Riau, Satuan Kenegaraan Daerah Banjar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Timor, Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Satuan Kenegaraan Jawa Tengah. Pihak-pihak yang menganut federasi mendapat angin, cita-cita negara kesatuan ternyata cepat tercapai dengan kesadaran dan kemauan yang keras bangsa kita sendiri untuk tidak mempertahankan lebih lama produk KMB. Dalam Kasus NIT ini sebenarnya tidak seluruhnya hanya sebahagian tokoh-tokoh saja yang menghendaki berdirinya NIT (Anonim, 1978: 12). Andi Azis turut sependapat di mana rupanya telah tercapai persetujuan pendapat antara Andi Azis dengan Soumokil, bahwa kelak dalam NIT Soumokil adalah tokoh politik, sedangkan ia sendiri adalah tokoh militer atau panglimanya.

Andi Azis secara politik termasuk kelompok yang tetap ingin mempertahankan federalisme, ia mengharap mendapat kedudukan pucuk pimpinan militer dalam bentuk federalisme. Dalam NIT, yakni Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati sebagai presiden. Hal ini dapat dipahami mengingat disamping latar belakang bentuk pribadi Andi Azis yang dibesarkan dalam lingkungan Belanda, dengan berkat didikan penjajahan pada umumnya maka ia tetap ingin dengan bentuk federalis tersebut, sesuai dengan paham feodalis

yang dianut oleh sebagian kaum bangsawan.

Parlemen NIT, Fraksi Kesatuan yang diketuai oleh Lanto Daeng Pasewang menganjurkan mosi membubarkan NIT, sehingga menimbulkan perdebatan yang seru. Dengan secara spontan rakyat di Sulawesi Selatan mendukung mosi Fraksi Kesatuan. Kemudian Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPRRI) yang menggerakkan kekuatan kaum republiken untuk membubarkan NIT, mengadakan demonstrasi bekerjasama dengan partai-partai dan organisasi yang berada di Makassar. Untuk melaporkan keadaan di Makassar, maka diutus ke Yogyakarta (sebagai ibukota), menghadap Pemerintah RI yaitu Makkarang Daeng Manjarungi dan Riri Amin Daud (Djarwadi, 1972: 46).

Meningkatnya tuntutan terhadap pembubaran NIT, menyebabkan pemerintah NIT mencoba mencari dalangnya. Menjelang akhir Maret 1950 penangkapan terjadi di mana-mana, sebagian besar yang dicari adalah aktivis BPRI (Barisan Pemberotakan Rakyat) seperti Yusuf Bauty dan F. Pondaag. Di samping ada penangkapan oleh polisi terhadap aktivitas BPRRI. Sebaliknya rumah orang-orang pro Belanda atau yang ingin mempertahankan NIT seperti Andi Massarapi, Baso Daeng Malewa, dan sebagainya dilempari batu atau granat tangan. Suasana tersebut membuat Kabinet NIT di bawah Perdana Menteri Diapari menjadi gugup, karena penangkapan yang dilakukan justru memancing kekerasan baru (Poelinggomang, dkk, 2005: 266).

Perjuangan yang sama juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lokal dari kalangan aristokrat atau kaum bangsawan di Sulawesi Selatan yang tidak ingin memperoleh kedaulatan

dalam bentuk negara federal. Mereka berusaha lewat pemerintah RI yang berada di Yogyakarta agar membubarkan NIT. Untuk mewujudkan itu berangkat ke Yogyakarta sejumlah pimpinan dari kalangan aristokrat pro republik pada akhir Maret 1950 seperti Andi Mappanyukki (mantan Raja Bone), Andi Jemma (mantan Datu Luwu), Pajonga daeng Ngalle (mantan Karaeng Polombangkeng), Andi Sultan Daeng Raja (mantan Karaeng Gantarang), dan lain-lain. Rombongan tersebut di bawah pimpinan Lanto Daeng Pasewang, disertai Kapten M. Yusuf, dan Letnan Bing Latumahina dari KMTIT (Poelinggomang, dkk, 2005: 267).

Situasi kemiliteran di Indonesia Timur dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan hasil KMB, maka KNIL itu dimasukkan kedalam TNI. Terutama bagi KNIL asal bangsa Indonesia, dengan melalui prosedur administratif yang cukup berbelit. Tentu saja mengalami banyak persoalan-persoalan psikologis mengingat mereka dilebur ke dalam TNI yang katakanlah selama berdiri pada pihak yang berbeda kepentingannya. KNIL untuk kepentingan Belanda, TNI yang semula memang berasal dari segala lapisan dan golongan yang spontan memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat tidak kenal pamrih. Masalah psikologis akan lebih terasa oleh pihak KNIL termasuk pasukannya Andi Azis, sehingga kemudian banyak menimbulkan kegelisahan seperti keraguan apakah benar akan diterima dalam TNI, apakah akan diturunkan pangkatnya demikian rendah.

Usaha-usaha Belanda dibidang militer kelihatan juga, seperti dengan memusatkan pasukan-pasukan KNIL di Indonesia Timur. TNI di daerah ini belum mempunyai kekuatan pengamanan yang berarti, tidak seperti

halnya di Jawa dan Sumatera. Bagi pihak-pihak yang menginginkan Republik Indonesia bersatu yang lazim disebut golongan unitaris, saat itu menyatu di jiwa rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi. Sebaliknya upaya Belanda untuk kembali di Indonesia Timur melalui tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dapat dipengaruhinya, karena mempunyai latar belakang kehidupan Eropa yang mendalam.

Reaksi dari golongan unitaris terlihat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan (DPRSS) pada bulan Desember 1949, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh A. Rasyid Faqih, Haji Mattewakkang Daeng Raya, dan A. Karim Mamangka mengajukan mosi mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, agar supaya didatangkan pasukan TNI guna menjaga keamanan di daerah Sulawesi Selatan. Mosi ini mendapat tantangan dari golongan federalis menginginkan pasukan-pasukan bekas KNIL yang telah berada di Indonesia Timur, untuk tetap menjaga keamanan atas nama APRIS.

Golongan ini diawali oleh Andi Massarapi dan kawan-kawan, di mana telah mengadakan pemungutan suara, ternyata sesuai dengan aspirasi rakyat kita, hasilnya golongan unitaris menang. Sehingga disampaikan kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mengirimkan pasukan TNI ke Indonesia Timur, maksudnya adalah untuk mengamankan Makassar. Mosi ini disampaikan kepada Menteri Pertahanan Hamengkubuwono tanggal 23 Desember 1949 (Agung, 1985: 721).

Pertikaian Elite Militer

Dalam jabatannya Hamengkubuwono didampingi A.H.

Nasution berkeliling ke seluruh ibukota negara bagian RIS, untuk menempatkan seorang panglima dari TNI sebagai gubernur militer yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan untuk menerima kekuatan Territorial dari tangan Belanda. Hanya di ibukota NIT usaha menempatkan seorang panglima menemui kegagalan, karena Kabinet NIT mempunyai rencana tertentu. Akhirnya dicapai suatu kompromi dengan diadakan suatu Komisi Militer Territorial Indonesia Timur (MTIT), untuk mengatur konsolidasi APRIS (Djarwadi, 1972: 43).

KMTIT ini terdiri dari Ir. Putuhena Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua, Letkol A.J. Mokoginta dari TNI sebagai anggota, dan Mayor Nanlohy dari KNIL sebagai anggota. Yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah keamanan di Indonesia Timur termasuk penampungan KNIL yang akan menjadi anggota TNI dengan segala prosedur dan kebijaksanaannya (Djarwadi, 1972: 43). Sebagai gerakan imbang tanggal 3 April 1950 panitia pembentukan peralihan KNIL ke APRIS yang diketuai oleh seorang pensiunan Sersan Mayor KNIL Christofe telah mengadakan rapat di Makassar dan telah mengeluarkan pernyataan sikap Mendesak pimpinan KNIL dan APRIS di Jakarta supaya sisa KNIL di Makassar selekas mungkin dimasukkan ke dalam APRIS, mendesak pimpinan NIT supaya pengiriman APRIS ke Makassar ditunda dulu, mendesak pemerintah NIT mencegah kedatangan pasukan APRIS di Makassar (Djarwadi, 1972: 47).

Oleh karena itu tanggal 4 April 1950 setelah beberapa rapat sebelumnya yang dilakukan oleh anggota KNIL bertempat di Bioskop Alhambra dan ditempat-tempat lainnya, mengeluarkan mosi penolakan atas pengiriman pasukan APRIS bekas TNI oleh Pemerintah RIS.

Sejumlah 300 orang anggota KNIL dan polisi yang dipimpin oleh Hitepoo, Lilipaly, dan lain-lain, mengadakan pertemuan di kediaman Soumokil yang dihadiri juga Andi Azis. Topik pembicaraan rencana melakukan tindakan pencegahan kehadiran Batalyon Worang yang mendarat besok dengan menggunakan Kapal Wikelo dan Bonteku (Kadir, dkk, 1984: 235).

Presiden NIT Sukowati yang hadir juga pada pertemuan itu turut memberikan pengarahan, agar mereka tetap tenang dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak pantas. Petunjuk dan nasehat itu diterima oleh hadirin, akan tetapi setelah Sukowati meninggalkan pertemuan, tampil Soumokil yang berusaha mendorong dan menghasut. Menurut Soumokil agar perlu dilaksanakan tindakan pencegahan pendaratan Batalyon Worang, karena keadaan semakin hangat. Dengan hasutan Soumokil, maka Andi Azis bersedia melakukan rencana yang dicanangkan oleh Soumokil (Bagi Andi Azis dinyatakan sebagai taktik yang ditempuh untuk dapat menguasai anggota KNIL, ia sudah terpancing oleh hasutan Soumokil) agar tidak terjadi pertumpahan darah yang hebat (Kadir, dkk, 1984: 238).

Suasana dikalangan militer menjelang tanggal 5 April 1950 hangat sekali, baik oleh terjadinya Angkatan Perang (APRA) di Jawa Barat yang memakan cukup banyak korban, apalagi saat tibanya pendaratan Batalyon Worang di Makassar. Untuk meredakan keadaan dilakukan usaha oleh kedua belah pihak yaitu oleh Kapten Tahya dari KNIL dan Letkol A.J. Mokoginta dari APRIS/TNI. Kapten Tahya telah melakukan pembicaraan-pembicaraan selama 6 jam dengan anggota-anggota KNIL. Hasil pembicaraan memberikan pengharapan

untuk adanya saling pengertian serta tidak menimbulkan persoalan yang membahayakan. Kapten Tahya telah melaporkan pada Pemerintah NIT, bahwa apabila Batalyon Worang mendarat tidak akan terjadi apa-apa. KNIL tetap memegang disiplin akan dimasukkan ke APRIS dengan melalui proses yang ditentukan oleh pucuk pimpinan APRIS dan KNIL (Djarwadi, 1972: 47).

Tindakan militer Andi Azis sebenarnya berpangkal pada rencana pengiriman tambahan pasukan APRIS dari Jawa ke Makassar. Menurut rencana semula, peleburan bekas KNIL menjadi anggota APRIS ternyata tidak dilaksanakan secepat mungkin. Hanya satu unit pasukan KNIL di bawah pimpinan Letnan Andi Azis yang dilantik tanggal 30 Maret 1950, pangkatnya dinaikkan menjadi kapten (Kadir, dkk. 1984: 234), sedangkan pasukan KNIL lainnya belum dilebur menjadi APRIS. Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan merupakan daerah pemusatan pasukan KNIL, karena Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang perlawanannya begitu hebat oleh Belanda.

Oleh pasukan KNIL setempat, terutama Andi Azis dengan kedatangan pasukan ditolak dengan alasan toh mereka juga sudah TNI, untuk apa didatangkan TNI dari Jawa. Namun sebenarnya alasan ini tidaklah demikian saja, sebab sebenarnya telah dipolitikkan sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan kepentingan federalis. Di mana Belanda mempunyai banyak kepentingan, alasan-alasan ini banyak dikemukakan.

Pola Model Keamanan Nasional dalam Stabilisasi Kondisi Keamanan Sulawesi Selatan Pasca Insurgensi Andi Azis

Pendekatan yang digunakan pemerintah dan APRIS/TNI pada saat itu tidak lepas dari pola model keamanan nasional yang komprehensif. Merujuk pada teori Keamanan Nasional yang disampaikan Prof. Joewono Sudharsono, Mantan Gubernur Lemhannas bahwa paradigma Kamnas secara utuh jika mampu mengakomodir kepentingan negara untuk menyelenggarakan Pertahanan Negara, Keamanan Negara, Keamanan Publik dan Keamanan Insani (Sumantri, 2020). Oleh karena itu tindak lanjut dari peristiwa ini, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) meminta agar dikirim wakil NIT ke Jakarta untuk memberikan laporan tentang peristiwa ini. Akhirnya tanggal 6 April 1950 berangkat Mokoginta yang didampingi Menteri Penerangan NIT, Dr. J. W. Ratulangi ke Jakarta untuk membicarakan situasi di Sulawesi Selatan. Bersama Pemerintah RIS dan Markas Besar Angkatan Darat, dalam pembicaraan itu Ratulang menyatakan bahwa tindakan Andi Azis di luar kehendak dan tidak didukung oleh NIT.

Pemerintah RIS melalui telegram lewat presiden NIT Sukowati, yang isinya menyebutkan kalau Andi Azis cepat menghadap ke Jakarta ia tidak akan ditahan tapi akan diselesaikan sebaik-baiknya. Andi Azis membalas surat kepada presiden Sukowati untuk meminta waktu mengenai pemanggilan itu. Akhirnya Andi Azis diberi ultimatum menyerahkan diri selama empat kali 24 jam kepada Andi Azis, sejak tanggal 9 April 1950 (Amir, 2001: 45; Agung, 1985: 735).

Satu hari sebelumnya Andi Azis bersedia memenuhi panggilan menteri Pertahanan di Jakarta, telah diterima perintah dari Letkol Sentot melalui Lettu A. Yusuf di Jakarta. Yang mengirim kurir Nona Andi Nurhani Makkasau

yang berisi: (1) Supaya kemampuan tempur pasukan tetap dipelihara, (2) Tidak lama lagi kita akan menyerang dan merebut Makassar, untuk itu supaya pasukan Andi Sapada menempati posisi yang dapat mengamankan pendaratan di Lapangan Terbang Mandai, pantai daerah Barru, pantai jurusan Bantaeng, pantai daerah Sinjai (Djarwadi, 1972: 51).

Oleh sebab itu selama bermarkas di Palangga telah diadakan rapat yang memberi keputusan: (1) Tetap memelihara kekompakan pejuang-pejuang dan daya tempur pasukan, (2) menggalang pasukan pejuang bersenjata Republik Indonesia dan memelihara daya juang rakyat republik, (3) berusaha melepaskan tawanan, (4) mengadakan kontak langsung dengan Jakarta melalui kurir melakukan tindakan yang mengamankan pendaratan TNI (Djarwadi, 1972: 51).

Tepat pada tanggal 13 April 1950 Andi Azis menyerahkan diri demikian juga pistolnya, kemudian meminta jaminan kebebasan sesuai dengan telegram tersebut. Selanjutnya diperintahkan juga, agar Andi Azis mengkonsinyir pasukannya. Melepaskan semua tawanan akibat peristiwa itu, dan menyerahkan kembali alat-alat senjata yang telah jatuh ketangannya kepada yang berhak. Tuntutan yang terakhir itu ternyata disanggupi oleh Andi Azis dan akan dipenuhi untuk melaporkan diri ke Jakarta tanggal 13 April, pernyataan kesanggupan disampaikan lewat Letkol A.J. Mokoginta. Namun kenyataannya tidak demikian membuat Andi Azis kecewa dan sakit hati, karena kemudian ia ditangkap dan di penjara. Dari pihak Kementerian menganggap ia telah melewati batas waktu yang ditentukan, karena menyerahkan diri sesudah

pidato Bung Karno, jadi telah melewati batas waktu yang ditentukan (Bactiar dan dkk, 2019).

Pada Kamis, 13 April 1950, 20.15 WIB, dengan melalui radio RIS di Jakarta sebagai Persiden RIS dan panglima tertinggi dari Angkatan Perang RIS telah menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah RIS, selanjutnya beliau mempercayakan Angkatan Perang RIS untuk menyelesaikan peristiwa Makassar yang bertentangan dengan hukum negara dan tentara (Bardosono, 1956: 17). Kehadiran pasukan ekspedisi mendapat sambutan gembira dari rakyat, di pihak lain kegembiraan ini juga menjadi pangkal ejekan bagi bekas KNIL, yang mengundang terjadinya beberapa kali insiden kecil antara pasukan TNI dan pasukan bekas KNIL, namun sebelum ekspedisi tiba di Makassar, yang mendalangi gerakan itu Soumokil dan pendukungnya meninggalkan Makassar dengan menggunakan pesawat Angkatan Perang Belanda menuju Ambon. Batalyon Worang mendarat di Pattontongan dapat memasuki Makassar atas bantuan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Pasukan ini yang kemudian menata pendaratan Divisi pasukan ekspedisi sehingga tidak mengalami hambatan (Kadir, dkk, 1984: 241).

Situasi di Makassar sudah berubah membaik, ada pesa khusus dari Komandan Operasi terhadap semua komandan batalyon supaya menjaga benar mobilitas pasukan dengan tidak mencampuri urusan territorial, politik, dan pemerintahan sipil, terhadap pasukan diharapkan berhati-hati dan bijaksana. Pada upacara 17 Agustus 1950, Presiden Sukarno mengumumkan pembubaran RIS dan menyatakan kembali terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sejak saat itu semua negara bagian dinyatakan bubar bersama kabinetnya. Terbentuknya NKRI berdasarkan Undang Undang dasar Sementara 1950 yang disahkan pada 15 Agustus 1950 dan diumumkan ke seluruh pelosok tanah air.

Akhirnya setelah Andi Azis menyerahkan diri di Jakarta kemudian ditahan di CPM Guntur Jakarta selanjutnya diadili ditahanan militer di Yogyakarta tahun 1953, dengan saksi-saksi antara lain: Letkol Mokoginta, dan Bekas Presiden NIT Sukowati, hakim oleh R.S. Gandasubrata, dan Jaksa Mr. Imam Bardjo. Persidangan Andi Azis berlangsung cukup panjang dan lama dari 25 Maret 1953 selanjutnya keputusannya pada tanggal 9 April 1953 dengan dijatuhi hukuman 14 Tahun di potong waktu selama ditahan (Anonim, 1953: 299).

Menentukan bahwa hukuman itu harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan di CPM dan rumah penjara sampai hari putusan ini mendapat kekuatan. Menunjuk terhukum sebagai pihak yang harus memikul biaya perkara-perkara ini. Demikian putusan ini dinyatakan pada hari: Rabu tanggal 8 April 1953 oleh kami Letkol RST Gandasubrata, ketua pengadilan tentara di Yogyakarta dan pada hari itu juga putusan ini oleh ketua tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh Mayor Slamet Cokroprawiro, anggota-anggotanya Mayor Mr. Imam Bardjo, Jaksa tentara Kapten RP. Muhammad Mukhtar Suryaningrat, Panitera dan Terhukum tersebut (Anonim, 1953: 299).

Pada tahap pertama ia ditahan di rumah penjara Wiraguna Yogyakarta selama tiga tahun, kemudian dipindahkan ke Cimahi. Di Cimahi ia ditahan tiga tahun dan sempat pula berontak dengan melucuti penjaga,

tetapi dapat ditangkap kembali. Kemudian ia dipindahkan ke Penjara Ambarawa. Menurut Andi Azis waktu dipenjara ia didatangi oleh utusan Presiden Soekarno (sabar) untuk menghadap Presiden Soekarno untuk menjadi komandan Cakrabirawa tetapi ditolak. Andi Azis menjalani hukuman hingga selesai di Jakarta, selama setahun sesudah dilepas ia masih diharuskan melapor kepada yang berwajib setiap hari senin. Pasukan-pasukannya setelah Andi Azis menyerah kemudian menyerahkan diri kepada pasukan TNI (Kapten Hertasning), selanjutnya pengamanan berjalan lancar. Andi Azis kemudian dibebaskan tahun 1958 dan menetap di Jakarta, tetapi belum pernah kembali ke Makassar hingga masa orde baru.

Berdasarkan kasus-kasus insurgensi yang pernah terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara yang berdaulat tidak terlepas dari kemungkinan adanya insurgensi. Karena insurgensi lahir dari ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan seluruh masyarakatnya tanpa membeda-bedakan.

D.Kesimpulan

Peristiwa Andi Azis memberi warna pada jejak sejarah perjuangan militer Indonesia dalam memberantas pemberontakan yang justru digerakkan para perwiranya saat itu. Peristiwa yang terjadi di awal April 1950 di Makassar Sulawesi Selatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Jakarta dalam mengelola pembentukan negara yang saat itu memang masih belum stabil namun juga sebagai perlawanan sosial tentara daerah sebagai representasi kekuatan rakyat paling efektif di masanya.

Perkembangan Kota Makassar pada masa-masa awal kemerdekaan, maka

terlebih dahulu dibahas secara singkat tentang pembentukan Propinsi Sulawesi. Sebelum dikenal sebagai daerah Sulawesi Selatan, wilayah yang dihuni oleh etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dahulunya merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Gubernur yang pertama-tama ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi. Adapun pusat pemerintahan Propinsi Sulawesi yaitu di Kota Makassar. Gerakan pemberontakan Andi Azis dapat menjadi pengalaman dan pelajaran tersendiri terutama bagi TNI dalam mengedepankan pendekatan sosial serta kemanunggalan bersama masyarakat disamping langkah-langkah represif dalam menanggulangi gerakan serupa yang sesungguhnya hingga saat ini pun masih terjadi di beberapa daerah di nusantara.

Sejak dibentuknya negara Indonesia Timur terjadi gerakan-gerakan yang berupaya untuk kembali ke Negara Republik Indonesia. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai gerakan yang bersifat destruktif (merusak). Sehingga untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut pemerintah melakukan pendekatan kepada pemimpin gerakan dan masyarakat umum secara terus-menerus baik itu di Kota Makassar maupun dipedalaman atas dasar persetujuan RIS-RI mengenai pembentukan negara kesatuan, yang harus diusahakan sesuai dengan jalur hukum yang benar, bukan dengan memberontak.

Daftar Referensi

Anderton, J.L, dkk. (2002). *Nefrologi*.

Jakarta : Hiprokates.

Al Rasyid, Harun. (1984). *Dasar*

Statistika Terapan. Program Pasca Sarjana, Unpad: Bandung

Bahtiar, Ansaar, Sritimuryati, (2019),

Andi Azis Events In South Sulawesi 5 April 1950, Seminar Series in Humanities and Social Sciences No.

Clausewitz, Karl Von, (1954). *Tentang*

Perang (Terjemahan R. Soeatyo),

Jakarta : Pembimbing

Connell, Meehan. T. (1966). *Spirituality and spiritual care from a Careful Nursing perspective*, *Journal of Nursing Management*, 20(8), pp. 990-1001. doi: 10.1111/j.1365-2834.2012.01462.x

Fahri Abdillah, (2019), *Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis*

Galula, David (2020).

Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Strategic Studies

Gay, L. R., and P. L. Diehl. (1996).

Research Methods For Business and Management. International Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Laessach M Pakatuwo, Mustari Bosra,

Ahmadin, (2018), *Negara Boneka*

Belanda (Negara Indonesia Timur)

1945- 1950, *Jurnal Pattingalloang*, Vol 5 No.1.

Oatley, Carl. (2000). *Australia's National*

Security Framework A Look to the

Future. Australian Defence Studies Centre

O'Neill, G. & McMahon, T. (2005).

Student-centred learning: What does it mean for students and lecturers?.

(Online).

([http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneillmcmahon-](http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneillmcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.html)

[Tues_19th_Oct_SCL.html](http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneillmcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.html), diakses 15 Agustus 2021).

Perwita, Anak Banyu dan Yanyan

Mochamad Yani. (2006). *Pengantar*

Ilmu Hubungan Internasional.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sumantri, Siswo Hadi (2020), *Ontologi*

IV: Keamanan Nasional sebagai

Konteks Makro Ilmu Pertahanan,

Universitas Pertahanan RI

Yuda Prinada, (2021), *Sejarah*

Pemberontakan Andi Azis: Penyebab,

Tujuan dan Dampaknya.